PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERIKANAN



LAPORAN KINERJA

LKj

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2013 – 2018. LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013 - 2018).

LKj Dinas Perikanan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Perikanan Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perikanan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perikanan Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perikanan Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perikanan pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perikanan Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (enam) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perikanan Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sinjai, Mei 2019

Kepala Dinas Perikanan Kab. Sinjai

Ir. SULTAN H. TARE

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perikanan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perikanan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Perikanan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Perikanan tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan Kab. Sinjai.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu : Pengembangan Budidaya air tawar, Percontohan budidaya, Pengembangan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan, Pengadaan Saran dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Nelayan, jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, konsumsi ikan per kapita, jumlah tenaga kerja pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan merupakan indikator kinerja sasaran yang terealisasi 100%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perikanan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perikanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA P	PENGANTAR	ii
IKHTIS	AR EKSEKUIF	iii
DAFTA	R ISI	iv
DAFTA	R TABEL	V
DAFTA	R GAMBAR	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1
	Maksud dan Tujuan	1
	Gambaran Umum Organisasi	2
	Isu Strategis	5
	Struktur Organisasi	7
	Komposisi SDM Organisasi	8
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
	Rencana Strategis	12
	Visi dan Misi	12
	Tujuan dan Indikator Kinerja	13
	Sasaran dan Indikator Kinerja	14
	Program untuk Pencapaian Sasaran	16
	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	16
	Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
	Rencana Anggaran Tahun 2018	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	Capaian Kinerja Organisasi	21
	Capaian Indikator Kinerja Utama 2018	22
	Perbandingan Capaian Kinerja	23
	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
	Realisasi Anggaran	30
RAR IV	PENLITUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perikanan Tahun 2018	6		
Tabel	1.2	Komposisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Golongan	8		
Tabel	1.3	Komposisi Sumberdaya Pegawai menurut Bidang			
Tabel	1.4	Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan	10		
Tabel	1.5	Komposisi PNS menurut Diklat PIM tahun 2018	11		
Tabel	1.6	Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural	11		
Tabel	2.1	Tujuan dan Indokator Kinerja Dinas Perikanan	14		
Tabel	2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan	15		
Tabel	2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran tahun 2018	16		
Tabel	2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan tahun 2018	17		
Tabel	2.5	Iku Dinas Perikanan	18		
Tabel	2.6	Rencana Belanja Dinas Perikanan TA 2018	19		
Tabel	2.7	Alokasi per Sasaran tahun 2018	19		
Tabel	3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21		
Tabel	3.2	Tabel Pencapaian Indikator tahun 2018	22		
Tabel	3.3	Perbandingan Capaian 2017 dengan 2018 dan Target RENSTRA	23		
Tabel	3.4	Rencana dan Realisasi Capaian pada Sasaran 1	24		
Tabel	3.5	Rencana dan Realisasi Capaian pada Sasaran 2	25		
Tabel	3.6	Rencana dan Realisasi Capaian pada Sasaran 3	26		
Tabel	3.7	Rencana dan Realisasi Capaian pada Sasaran 4	27		
Tabel	3.8	Rencana dan Realisasi Capaian pada Sasaran 5	28		
Tabel	3.9	Rencana dan Realisasi Capaian pada Sasaran 6	29		
Tabel	3.10	Pencapaian Kinerja & Anggaran tahun 2018	30		
Tabel	3.11	Efisiens Penggunaan Sumberdaya	32		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Sinjai	7
Gambar 2	Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Sinjai	8
Gambar 3	Jumlah PNS berdasarkan Bidang dan UPTD	9
Gambar 4	Persentase PNS menurut Jenjang Pendidikan	10
Gambar 5	Perimbangan PNS & Jenis Kelamin menurut Jenjang Pendidikan	10
Gambar 6	Persentase Pencapaian IKU Tahun 2018	23

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perikanan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Perikanan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perikanan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perikanan

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka bagian Sekretariat mempunyai fungsi: 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas; 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan; 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; 4) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaiaan dan; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Budidaya, Pengendalian dan Kesehatan Lingkugan, Sarana dan prasarana budidaya . Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Pelaksanaan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; 2) Perumusan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya, Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan dan Sarana dan prasarana budidaya.; 3) Pelaksanaan pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya : 4) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan budidaya, pengendalian dan kesehatan lingkungan, budidaya; 5) pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

Bidang Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan sebagian tugas dinas, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan peleksanaan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan yang meliputi seksi Pengembagan Sumberdaya manusia, Bina Usaha Tekhnologi, Seksi Keleambagaan dan Penyuluhan, maka Bidang pengelolaan perikanan Tangkap melaksanakan fungsi: 1) perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya sesuai rencana kebetuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; 2) Pembinaan Pengembangan sumberdaya manusia; 3) Kegiatan bina usaha dan tekhnologi; 4) Menyusun rencana kegiatan pengembangan sumberdaya manusia; 5) Menyusun SOP; 6) Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegaiatan; 7) Menyususn rencana kelembagaan dan penyuluhan; dan 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan Tempat Pelalangan Ikan Lappa dan Tempat Pelalangan Ikan Pembantu Tongke-Tongke. Dalam melaksanakan tugas dalam pengelolaan Tempat Pelalangan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan; 2) menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan; 3) mengawasi dan mengendalikan pengelolaan tempat pelelangan ikan; 4) memberikan pelayanan umum di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan; 5) melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPT; dan 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Tassililu dan Balai Benih Ikan (BBI) Palangka Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan tekhnis operasional dan/atau kegiatan tekhnis penunjang di bidang pengelolaan benih ikan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Membantu menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Balai Benih Ikan 2). Pembinaan dan Pengawasan Internal 3) Monitoring dan evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan, 4) Menyusun rencana anggaran utnuk kegiatan UPTD, 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perikanan yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelanggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Kerangka Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai tahun 2018 dengan tujuan mensinergikan infrastruktur, tata niaga dan akses pasar (dari hulu ke hilir) dalam rangka Pengembangan Minapolitan dan strategi Industrialisasi yang menerapkan kaidah Blue Economi dengan Fokus kepada:

1. Mendukung Pilar Utama Pembangunan Nasional

- a. Pilar Utama pada sektor Pertanian (Sub.Sektor Perikanan) dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, kesenjangan antar wilayah dan mendukung ketahanan pangan dan energi serta Industrial Kelautan dan Perikanan yaitu :
 - Pengembangan Perikanan Budidaya melalui rehabilitasi irigasi tambak, jembatan tambak, jalan produksi, pembuatan keramba jaring apung, dan pembuatan lantai jemur.
 - Pengembangan Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui dan pengembangan Pelabuhan Perikanan, penyediaan jalan lingkungan pesisir, penyediaan sarana air bersih dan pembuatan tambatan perahu.

2. Program Prioritas

- Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan pengembangan budidaya udang bandeng, rumput laut dan budidaya air tawar
- Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

3. Prioritas Unggulan OPD

Dengan tujuan meningkatnya kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan serta dukungan terhadap prioritas Nasional (Pro poor, pro job, pro Growth, Pro Environment) sebagai Pendukung Pilar Utama dengan Program:

- Pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya melalui pengembangan perbenihan budidya air tawar, payau dan Laut, pengembangan kawasan budidaya air payau, tawar dan laut, Pengembangan komoditas unggulan Udang dan Bandeng, Pengembangan usaha budidaya rumput laut.
- Pengembangan Perikanan Tangkap melalui pengembangan dan restrukturasasi armada perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
- **Pengembangan Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan** malalui pengembangan ijin usaha perikanan, pengembangan dan Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dalam meningkatkan mutu, pengembangan diverifikasi produk,

4. Pengarustamaan Gender

Isu ini diarahkan kepada program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan dengan perspektif gender.

Sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan beberapa indikator kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perikanan Tahun 2018

No	Rincian	Target
1.	Volume Produksi Perikanan (Ton)	64.278
2.	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	50
3.	Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita	47
4.	Jumlah Tenaga Kerja Perikanan (orang)	9.272

Adapun indikator sasaran dalam pelayanan merupakan bagian dari indikator kinerja utama dengan fokus kepada arahan teknis dan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi dinas yang terdiri dari atas 3 bidang teknis, 1 bidang sekretariat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

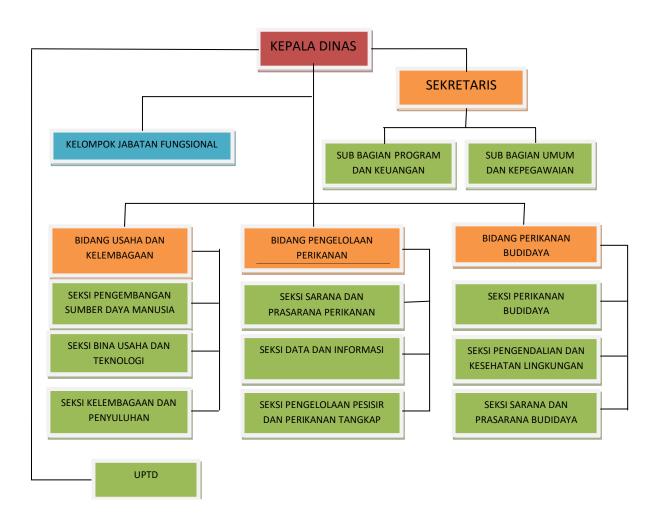
- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan

- 3) Bidang Perikanan Budidaya membawahi:
 - a. Seksi Budidaya
 - b. Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
- 4) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap membawahi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - b. Seksi Data dan Informasi
 - c. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap
- 5) Bidang Usaha dan Kelembagaan membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Seksi Bina Usaha dan Teknologi
 - c. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. BBI Dinas Perikanan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Sturuktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Sinjai seperti terlihat berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI

Perda Kabupaten Sinjai Nomor : 5 Tahun 2016 Tanggal : 29 Nopember 2016



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Sinjai

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

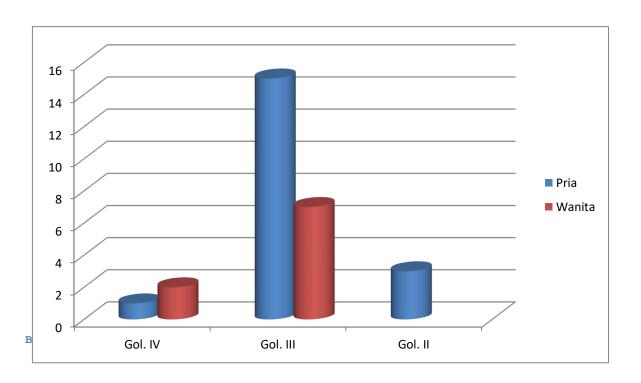
Dinas Perikanan Kab. Sinjai pada awal tahun 2018 memiliki jumlah pegawai sebanyak 30 orang, sampai pada akhir tahun 2018 jumlah pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sebanyak 28 orang dengan perincian: 13 orang merupakan pejabat strutural dan 15 orang merupakan fungsional umum.

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Pegawai Dinas Perikanan memiliki jumlah pegawai laki-laki sebanyak 24 orang dan pegawai perempuan sebanya 9 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel.1.2 Komposisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Golongan

No	Jabatan	Jenis K	elamin	Jumlah	
140	Jabatan	Pria	Wanita	Julilan	
1	Golongan IV/c	1	-	1	
2	Golongan IV/b	-	-	-	
3	Golongan IV/a	-	2	2	
4	Golongan III/d	5	2	7	
5	Golongan III/c	3	3	6	
6	Golongan III/b	6	2	8	
7	Golongan III/a	1	-	1	
8	Golongan II/d	-	-	-	
9	Golongan II/c	1	-	1	
10	Golongan II/b	1	-	1	
11	Golongan II/a	1	-	1	
Jumla	ah	19	9	28	

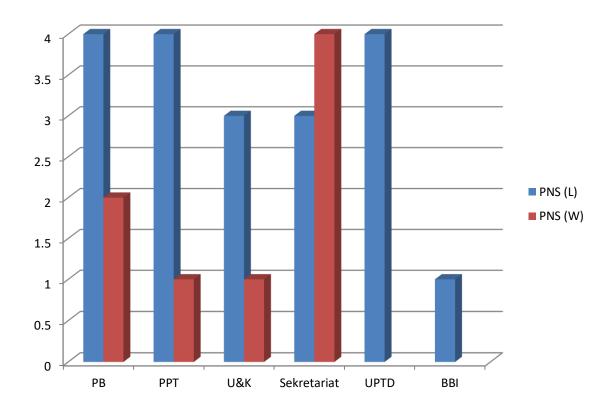


Gambar 2. Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kab. Sinjai

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai terdiri atas Sekretariat , 3 bidang, dan 2 UPTD . Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

Tabel. 1.3 Komposisi Sumberdaya Pegawai menurut Bidang

No	No Bidang/Unit		PNS		Kontrak		Jumlah
110	Blading/ Offic	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	ouman
1	Perikanan Budidaya	4	2	6	2	-	2
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4	1	5	1	-	1
3	Usaha dan Kelembagaan	3	1	4	2	1	2
4	Sekretariat	3	4	7	4	8	12
5	UPTD TPI	4	-	4	31	6	37
6	BBI Palangka	-	1	1	5	3	8
7	BBI Tassililu	1	-	1	2	3	5
	Jumlah	19	9	28	47	20	67



Gambar 3. Jumlah PNS berdasarkan Bidang dan UPTD Dinas Perikanan Sinjai

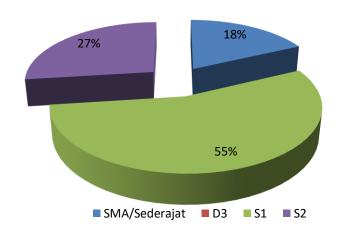
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 tercatat sebanyak 28 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Magister Sains (S2) sebagai berikut :

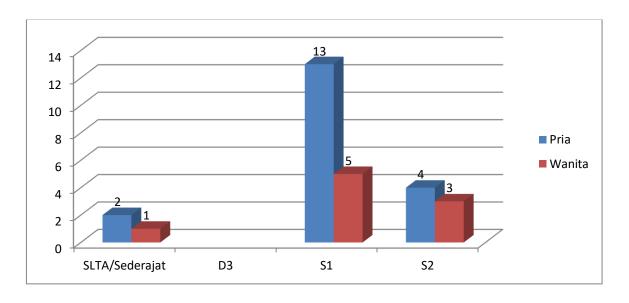
Tabel 1.4 Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis k	Jumlah	
ingkati endukan		Pria	Wanita	Julian
1	S2	4	3	7
2	S1	13	5	18
3	Sarjana Muda	-	-	-
4	SLTA	2	1	3
	Jumlah	19	9	28

Persentase Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 4 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 5 Perimbangan PNS Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2018

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten

Sinjai sejak tahun 2018 sebanyak 17 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II sebagai berikut :

Tabel 1.5 Komposisi PNS menurut Diklat PIM Tahun 2018

No	Diklat	Jenis k	Jumlah	
Dikiat		Pria	Wanita	darman
1	Diklat PIM II	1	-	1
2	Diklat PIM III	-	2	3
3	Diklat PIM IV	7	3	10
	Jumlah	8	5	13

Tabel 1.6 Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jenis k	Jumlah	
Japatan		Pria	Wanita	darman
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	-	2	2
3	Eselon IV	7	3	10
	Jumlah	8	5	13

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis SKPD Dinas Perikanan untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi SKPD Dinas Perikanan yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI: "Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Sinjai Sejahtera"

Penjelasan visi:

- ✓ Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Merupakan Proses Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Kelautan dan Perikanan yang Terus Menerus Untuk Lebih Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- ✓ Berkelanjutan bahwa Kegiatan Ekonomi Disektor Kelautan dan Perikanan Dapat Berlangsung Terus Menerus Sebagai Basis Ekonomi Masyarakat Sinjai dan Dapat Menyesuaikan Dengan Tuntutan Kondisi Ke Depan Dengan Tetap Memperhatikan Azas Kelestarian Lingkungan;
- ✓ Sinjai Sejahtera Merupakan Tekad dan Komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam Menyelenggarakan Pembangunan dan Membawa Masyarakat Sinjai Ke Arah Peningkatan Kesejahteraan, Menyikapi Berbagai Perubahan Lingkungan Internal dan Eksternal Serta Dinamika Masyarakat yang Semakin Berkembang, Sehingga Sinjai Sejajar dengan Daerah Maju Lainnya di Indonesia.

MISI:

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan penyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Proses perumusan misi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (stake holder) dan memberikan peluang perubahan sesuai dengan perkembangan yang dihadapi. Sehingga pernyataan misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah :

MISI I : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

MISI II : Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

MISI III : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan MISI IV : Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan yang terampil, profesional dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan misi sebagai berikut :

- ✓ <u>Misi 1</u>: Meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi kerakyatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya ikan;
- Misi 2: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga sumberdaya alam dengan melakukan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat merusak lingkungan sehingga tercipta pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan;
- ✓ <u>Misi 3</u>: Meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan mengutamakan potensi lokal sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokasi dan membuka peluang usaha seluas – luasnya dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada;
- Misi 4 : Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan dalam rangka menciptakan SDM yang memiliki jiwa usaha dan inovasi bidang kelautan dan perikanan serta menciptakan pemerintahan yang memiliki jiwa good governance, kepemimpinan yang amanah dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

Misi Dinas Perikanan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan.

TUJUAN

Misi 1 Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tujuan:

- 1. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat,
- 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan

Misi 2 Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tujuan: Meningkatkan kelestarian lingkungan

Misi 3 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan

Tujuan: Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal dan sinergitas regional, nasional dan global

Misi 4 Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan yang terampil, profesional dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan:

- 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan usaha perikanan
- 2. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan penataan sistem kelembagaan pemerintahan

Indikator kinerja dan target kinerja tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
<mark>Meningkatkan</mark>	Volume produksi	ton	62.222	64.278,46
kemakmuran ekonomi dan	perikanan			
taraf kehidupan				
masyarakat masyarakat				
Meningkatkan kualitas	Meningkatnya	paket	33	159
infrastruktur secara	infrastruktur kelautan			
<mark>bertahap dan</mark>	dan perikanan			
<mark>berkelanjutan</mark>				
Meningkatkan kelestarian	Pengurangan	kasus	4	18
lingkungan	kerusakan habitat laut			
	akibat IUU menjadi 0%			
Meningkatkan daya saing	Sarana dan prasarana	paket	200	990
daerah melalui	pengolahan dan			
pengembangan	pemasaran			
keunggulan lokal dan				
sinergitas regional,				
nasional dan global				
Meningkatkan lapangan	Tenaga kerja dengan	orang	12.984	14.474
pekerjaan dan usaha	pengaratusamaan			
perikanan	Gender			

SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan serta pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulua-pulau kecil.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan

Sasaran : Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur

Tujuan 3. Meningkatkan kelestarian lingkungan

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tujuan 4. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal dan sinergitas regional, nasional dan global

Sasaran:

- 1. Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing
- 2. Meningkatnya pengelolaan pemasaran produksi perikanan

Tujuan 5. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan usaha perikanan

Sasaran : Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan 6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan penataan sistem kelembagaan pemerintahan

Sasaran:

- 1. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur
- 2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Sasaran dan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan kondisi awal dan terget akhir renstra dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan serta pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan Pulau- pulau kecil	Volume produksi perikanan	Ton	62.222	64.278,46
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastuktur	Jumlah sarana dan prasarana infrastrutur tersedia	Paket	33	159
Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	%	25	25
	Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	kasus	4	18
	Jumlah pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan	Klp	3	5
Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing	Jumlah konsumsi ikan per kapita	Kg/kap/th	47	47
Meningkatnya pengelolaan pemasaran produksi perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	Paket	200	990
Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah tenaga kerja dengan pengaratusamaan gender	Orang	12.984	14.474

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaianya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan serta	Pengembangan perikanan tangkap, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan	Pemgembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan
yang memiliki daya saing	Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kualitas Sumber daya	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta disiplin Aparatur
Aparatur dan tertib Administrasi Pemerintahan serta kualitas	Peningkatan Kapisitas Sumber Daya Aparatur
pelayanan publik	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan	Pemgembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Perikanan telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan serta pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau- pulau kecil	Volume Produksi Perikanan	Ton	64.278
Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur dan tertib administrasi pemerintahan serta kualitas pelayanan publik	Sumber daya Manusia yang memiliki Kompetensi dan Kualitas dalam Pelayanan	Orang	34
Meningkatnya pengelolaan pemasaran produksi perikanan	Konsumsi Ikan Per Kapita	Kg/kap/th	47
Meningkatnya	Jumlah Tenaga Kerja pelaku usaha kelautan dan perikanan	Orang	9.272
keterampilan dan inovalasi pelaku usaha	Cakupan Binaan Kelompok	%	50
kelautan dan perikanan	Produksi Ikan Kelompok Nelayan yang dibina terhadap total produksi	%	0,84

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perikanan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU Dinas Perikanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya produksi dan	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	Realisasi / Target x 100	Statistik Kelautan & Perikanan
produktivitas perikanan serta	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp. Juta	Realisasi / Target x 100	Statistik Kelautan & Perikanan
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Unit	Realisasi / Target x 100	Statistik Kelautan & Perikanan
pesisir dan pulau-pulau kecil	Nilai produksi perikanan tangkap	Rp. Juta	Realisasi / Target x 100	Statistik Kelautan & Perikanan

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan	Persentase peningkatan infrastruktur ekonomi masyarakat pesisir	%	Realisasi / Target x 100	
infrastuktur	Jumlah produksi	Ton	Realisasi / Target x	Statistik Kelautan & Perikanan
	perikanan tangkap Jumlah produksi	Ton	Realisasi / Target x	Statistik Kelautan
	perikanan budidaya	1011	100	& Perikanan
Meningkatnya	Persentase peningkatan	%	Realisasi / Target x	
kualitas	pengawasan dan		100	
lingkungan dan	pengendalian			
sumberdaya	sumberdaya kelautan			
kelautan dan	dan perikanan	%	Realisasi / Target x	
perikanan	Persentase peningkatan pengelolaan dan	%	100	
	pengelolaan dan pemasaran produksi		100	
	perikanan			
Meningkatnya	Persentase peningkatan	%	Realisasi / Target x	
pemasaran hasil	pengelolaan dan	70	100	
produksi	pemasaran hasil			
perikanan yang	produksi perikanan			
mempunyai daya				
saing				
Meningkatnya	Konsumsi ikan per	Kg/kap/th	Realisasi / Target x	Statistik Kelautan
pengelolaan	kapita		100	& Perikanan
pemasaran				
produksi				
perikanan				
Meningkatnya	Jumlah tenaga kerja	orang	Realisasi / Target x	Statistik Kelautan & Perikanan
keterampilan dan	pelaku usaha kelautan		100	α renkandh
inovasi pelaku	dan perikanan			
usaha kelautan				
dan perikanan				

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 7.006.332.526.- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Perikanan TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.240.997.819,-	46%
2	Belanja Langsung	3.765.334.707,-	54%
	Jumlah	7.006.332.526,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan serta pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau- pulau kecil	Volume produksi perikanan	2.471.652.000	66
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur	104.218.000	2.76
infrastuktur	tersedia		

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing	Jumlah konsumsi ikan per kapita	555.622.707	14.75
Meningkatnya pengelolaan pemasaran produksi perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	227.556.000	6.04
Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah tenaga kerja dengan pengaratusamaan gender	406.286.000	10.7
	TOTAL		100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 2.471.652.000,-dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan serta pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengembangan budidaya perikanandengan besaran 66%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing yaitu sebesar 14,75 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastuktur sebesar 2,76 % dari total anggaran belanja langsung.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA		
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	Т
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

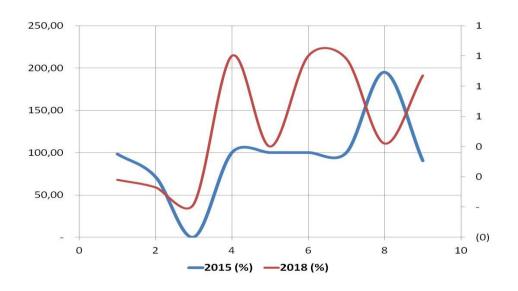
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2018

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perikanan untuk tahun 2018. Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2018

				2018		Target	Capaian
No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target	Realisasi	%	Akhir RENSTRA (2018)	s/d 2017 terhadap 2018 (%)
1	Volume Produksi	62.222	64.278	75.723,2	117,8	303.401	1.19
	Perikanan						
2	Jumlah sarana dan	33	33	33	100	159	10
	Prasarana infrastruktur						
	tersedia						
3	Jumlah Konsumsi Ikan	47	47	47	100	47	10
4	Jumlah Sarana dan	200	200	200	100	990	10,8
	Prasarana Pengolahan						
	dan Pemasaran						
5	Jumlah Tenaga Kerja	13.861	14.026	12.671	90,33	14.474	0,87
	dengan						
	Pengaratusamaan						
	Gender						

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan pada tahun 2018, 4 (empat) indikator menunjukkan capaian 100% dan ada lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. IKU Dinas Perikanan yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2018, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, hanya 1 indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 90,33 %. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 7 (tujuh) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi.



Gambar 6 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2018

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2017, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian 2017 dengan 2018 dan Target RENSTRA

				Perbandingan					
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaia n 2018	Target (RENSTRA)	Capaian 2016 Banding	
						Bandin		RENSTRA	
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan serta Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan P3K	Perikanan	Ton Rp.Juta	75.723,2 546.642.510	77.268,2 594.111.304	10,20	303.401	11,2	
2	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur	Jumlah sarana dan Prasarana infrastruktur tersedia	Paket	33	33	10	159	11,21	

						Perbandin	gan	
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2018 Banding 2017	Target (RENSTR A)	Capaian 2018 Banding RENSTRA
4	Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing	Konsumsi	Kg/Kap/ th	47	47	10	47	1
	pemasaran produksi perikanan	Sarana dan	Paket	33	33	10	159	10,8
	usaha kelautan dan	Tenaga Kerja dengan	Orang	12.671	12.593	1	14.026	0,9

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan serta Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Sasaran 1 merupakan sasaran yang bertujuan meningkatkan volume produksi perikanan dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian pada Sasaran 1

No		Kandisi		2018		Target Akhir	Capaian s/d 2017
NO	Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	%	RENSTRA (2018)	terhadap 2018 (%)
1.	Volume produksi perikanan	62.222	64.728	75.723,2	117	303.401	9,8
2	Nilai produksi perikanan (dalam Juta)		567.355.700	546.642.510	93.34	2.609.408.800	9.8

Untuk tahun 2018, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **Sangat Tinggi**, Capaian dan sesuia dengan terget akhir Renstra 2018. Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh 1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan kegiatan yaitu Pengembangan Budidaya Air Tawar, Percontohan Budiadaya,Pengembangan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan, Pengendalian hama dan penyakit ikan dan pemantauan OKB,Rehabilitasi pembangunan pintu air, workshop pengembangan pakan mandiri, pengembangan budidaya perikanan

2) Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan dengan kegiatan yaitu Lomba masak serba ikan 3) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan yaitu Pengadaan Pengadaan Sampan Fiber. Program/kegiatan tersebut memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi perikanan.

Permasalahan: Permasalahan yang timbul terhadap pencapaian sasaran adalah kurangnya anggaran dan sumberdaya yang tersedia

Solusi: Solusi terhadap permasalahan yaitu dengan memberikan prioritas pada program dan kegiatan prioritas serta mengoptimalkan terhadap sumberdaya yang tersedia

> Sasaran 2 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur

Sasaran 2 merupakan sasaran dalam rangka peningkatan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan. Sasaran tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2

		Kondisi		2018		Target Akhir	Capaian s/d 2017
No	Indikator	Awal	Target	Realisasi	%	RENSTR	terhadap 2018 (%)
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia		33	33	10	159	10,8

Untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **Sangat tinggi** Capaian ini juga menyumbang sebanyak 10,8 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). capaian kinerja memenuhi target sesuai dengan yang diusulkan. Dari 33 unit dan paket infrastuktur yang direncanakan terealisasi 33 unit dan paket infrastrutur. Ketersediaan infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar masyarakat khususnya masyarakat pesisir, hal tersebut dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat yang berada pada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pembangunan infrastruktu seperti pada daerah-daerah perkotaan.

➤ Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan

Sasaran 3 merupakan sasaran dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan, dimana dengan pengurangan kerusakan habitat dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya ikan.

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3

	Indikator	Kondisi Awal	2018			Target Akhir	Capaian s/d 2017
No			Target	Realisasi	%	RENSTRA (2018)	

Untuk tahun 2018, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **Sangat Tinggi**, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 2,4% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada di laut. Operasi pengawasan baik yang dilakukan oleh Dinas maupun oleh Kelompok SISWASMAS rutin dilakukan sekali dalam seminggu sehingga perusakan-perusakan yang diakibatkan penggunaan bahan-bahan yang dilarang dapat dikurangi.

Sasaran 4 Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing

Sasaran 4 merupakan sasaran dalam rangka mengetahui jumlah konsumsi ikan, sehingga dapat mengetahui tinggkat konsumsi ikan di masyarakat.

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4

	Indikator	Kondisi		2018		Target Akhir	Capaian s/d 2017
No		Awal	Target	Realisasi	%	RENSTRA (2018)	terhadap 2018 (%)
1.	Jumlah konsumsi ikan	47	47	47	100	47	10

Untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **Sangat Tinggi**, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 0,98% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2017, dipengaruhi oleh tingkat konsumsi ikan di masyarakat sangat tinggi. Hal ini berbandng lurus dengan produksi perikanan yang cukup tinggi. Di samping itu masyarakat sinjai memiliki tingkat konsumsi ikan yang cukup tinggi. Indikator pada sasaran 4 memiliki peningkatan sama dengan capaian dibandingkan tahun 2016. Terhadap peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu pengalokasian anggaran yang lebih dibandingkan dengan program dan kegiatan yang lainnya. Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasarana Produksi Perikanan dengan kegiatan yaitu Pameran dan promosi kelautan dan perikanan. Program/kegiatan tersebut memberikan nilai tambah dalam memasarkan hasil olahan produksi perikanan sehingga hasil olahan tersebut dapat lebih dikenal ke luar daerah.

Permasalahan: Permasalahan dalam pencapaian kinerja yaitu kurangnya dukungan pembiayaan terhadap UKM-UKM bidang kelautan dan perikanan sehingga permodalan yang dibutuhkan dalam peningkatan produksi tidak ada.

Solusi: Solusi yang dapat dilakukan adalah membantu melakukan pemasaran melalui ajang pameran atau sejenisnya baik pada tingkat daerah maupun nasional.

➤ Sasaran 5 Meningkatnya pengelolaan pemasaran produksi perikanan

Sasaran 5 merupakan sasaran dalam rangka peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemasaran.

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5

	Indikator	Kondisi	Kondisi		2016		Capaian s/d 2017
No		Awal	Target	Realisasi	%	RENSTRA (2018)	terhadap 2018 (%)
1.	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	33	33	33	100	159	10,8

Untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang Sangat Tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 0,42% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2017, dipengaruhi oleh peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan pada program peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, sehingga dapat mengurangi tingkat kerusakan hasil tangkapan dan meningkatkan olahan hasil perikanan. Indikator pada sasaran 5 memiliki peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian dibandingkan tahun 2015. Terhadap peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu pengalokasian anggaran yang lebih dibandingkan dengan program dan kegiatan yang lainnya. Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan kegiatan yaitu Pameran dan promosi kelautan dan perikanan, Bimbingan tekhnis pengolahan hasil perikanan, bimtek penanganan hasil tangkapan ikan diatas kapal, bimtek pengembangan kelembagaan dan usaha peikanan berbasis participatori rural apraisal (PRA)

Permasalahan: Permasalahan dalam pencapaian kinerja yaitu kurangnya dukungan pembiayaan terhadap UKM-UKM bidang kelautan dan perikanan sehingga permodalan yang dibutuhkan dalam peningkatan produksi tidak ada.

Solusi: Solusi yang dapat dilakukan adalah membantu melakukan pemasaran melalui ajang pameran atau sejenisnya baik pada tingkat daerah maupun nasional.

Sasaran 6 Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan

Sasaran 6 bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sehingga memiliki keterampilan dalam rangka peningkatan profesionalisme usaha perikanan.

Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6

	Indikator	Kondisi Awal Ta		2016			Capaian s/d 2016
No			Target	Realisasi	%	RENSTRA (2018)	terhadap 2018 (%)
	Jumlah tenaga kerja dengan pengaratusamaan gender	13.861	14.026	12.671	90,33	14.474	0,87

Untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **Sangat Tinggi**, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 0,87% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2018, dipengaruhi oleh peningkatan jumlah bimbingan teknis dan diklat bagi kelompok bidang kelautan dan perikanan. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan pada program bimbingan teknis memberikan kontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan.

REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 90,91% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program pengembangan sarana dan prasarana aparatur.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, se makin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 6 (enam) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 95%, yaitu sebanyak 5(lima) sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Jumlah Konsumsi Ikan, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 94,95% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak

90,91%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan serta Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau- pulau Kecil	Volume produksi perikanan (ton)	117,8	90,50	Т
		Nilai produksi perikanan (Rp. Juta)	93,34		Т
2	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur	Jumlah sarana dan prasarana tersedia	108	98,85	ST
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	100	97,96	Т
		Jumlah kasus penyelesaian tindak pidana	100		Т
		Jumlah POKMASWAS yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan	100	95,91	Т
4	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Perikanan yang Mempunyai Daya Saing	Jumlah konsumsi ikan	100	94,95	Т
5	Meningkatnya Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	108	95,96	ST
6	Meningkatnya Keterampilan dan Inovasi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Jumlah tenaga kerja dengan pengaratusamaan gender	90,33	96,67	Т

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Organisasi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Perikanan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 7 (tujuh) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perikanan ke depan. Beberapa hal yang menjadi tantangan ke depan adalah peningkatan tingkat partisipasi masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya ikan dalam menunjang pembangunan dan perbaikan kesejahteraan mereka. Pengurangan tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Perikanan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Perikanan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik

Lampiran 1

	_		Kinerja			
No	Sasaran	Indikator	Target		%	
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan serta	Volume produksi perikanan (ton)	64.278	75.723,2	117	
	Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Nilai produksi perikanan (Rp. Juta)	567.355.700	546.642.510	93,34	
2	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur	Jumlah sarana dan prasarana tersedia	33	33	100	
3	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Perikanan yang Mempunyai Daya Saing	Jumlah konsumsi ikan	47	47	100	
4	Meningkatnya Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	200	200	100	
5	Meningkatnya Keterampilan dan Inovasi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Jumlah tenaga kerja dengan pengaratusamaan gender	14.026	12.671	90,33	